

PWI Surakarta Silaturahmi Pimwan DPRD Karanganyar



KR-Abdul Alim

Jajaran DPRD Karanganyar bersama PWI Surakarta.

KARANGANYAR (KR) - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta bersilaturahmi dan audiensi dengan Pimpinan DPRD Karanganyar, Kamis (26/1). Dipimpin Ketua Dewan Kehormatan PWI Andjar Hari Wartono dan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Surakarta Sri Hartanto, rombongan diterima langsung Ketua DPRD Bagus Selo dan Wakil Ketua Toni Hatmoko di ruang Operational Room sekira pukul 10.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut diawali dengan pengenalan pengurus PWI Surakarta periode 2022-2027.

Selanjutnya, disampaikan rangkaian silaturahmi ini bagian dari PWI turun gunung memperkenalkan kembali PWI sebagai organisasi profesi kewartawanan tertua di Republik Indonesia serta rangkaian HUT PWI yang akan digelar di Kota Solo, mulai dari olahraga hingga pentas ketoprak yang akan digelar di auditorium RRI. "Besarnya harapan kami bapak Pimpinan DPRD Bagus Selo dan pak Toni Hatmoko bersedia ikut dalam pentas ketoprak," papar Sri Hartanto mengawali silaturahmi.

Selain membeberkan rangkaian Hari Pers Nasional, pria yang akrab disapa Tanto ini pun membeberkan syarat wajib wartawan untuk ikut Uji Kompetensi Jurnalistik. Menurut Tanto, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sangat diperlukan untuk mengasah kompetensi seorang wartawan, terutama wartawan dari Media Mainstream. Tanto pun mengutarakan perlunya adanya sinergitas antara DPRD dan PWI. Dan PWI siap mensupport full kegiatan anggota DPRD Karanganyar. "Tentunya kita ingin bersinergi dengan dewan, saling mensupport bahwa kita PWI Surakarta akan support full untuk berbagai tugas fungsi dprd dalam menjalankan tugasnya. begitu juga PWI butuh support dari DPRD dalam rangkaian berbagai kegiatan kedepan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo mengatakan siap mendukung berbagai kegiatan PWI Surakarta khususnya dalam rangkaian acara Hari Pers Nasional mendatang. "Agenda silaturahmi ini bagaimana kerjasama kedepan, saling mensupport DPRD bersama PWI, terkait nanti juga menghadapi hari pers nasional, kami juga ikut berpartisipasi supaya sukses," katanya. (Lim)-f

Diserahkan Dana Keserasian Sosial

TEMANGGUNG (KR) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Temanggung dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyerahkan bantuan keserasian sosial pada warga di Desa Bansari Kecamatan Bansari Temanggung. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Prasojio mengatakan bantuan keserasian sosial diserahkan untuk peningkatan kegotongroyongan dan kebersamaan warga. "Dinsos dan BNPT menyerahkan bantuan keserasian sejumlah Rp 150 juta," kata Prasojio, Rabu (25/1). Dikatakan bantuan itu diwujudkan berupa gedung pertemuan. Di gedung pertemuan tersebut sebagai wahana untuk bertemu dan bermusyawarah berbagai hal di masyarakat. Harapan, kata dia, terbentuk forum keserasian sosial yang lebih baik untuk mendeteksi dini bibit radikalisme dan konflik sosial, sebab masyarakat dapat mengenal satu sama lain secara lebih intimate dan personal di desa.

Dikemukakan pada forum keserasian sosial, masyarakat diajak untuk bekerja sama dan gotong royong satu sama lain, meski mereka mempunyai latar belakang yang berbeda. Dikatakan di Bansari, bantuan juga untuk kearifan lokal yang diwujudkan seragam kesenian. Nilainya Rp 50 juta. "Kesenian tradisional sebagai wahana untuk sosialisai bahaya radikalisme dan terorisme," katanya. Harapannya, dana keserasian sosial bisa fokus untuk mencegah radikalisme dan terorisme serta meningkatkan kesejahteraan warga. Diperlukan kebersamaan kegotongroyongan untuk peningkatan kesejahteraan, terjual dari radikalisme dan tidak sebagai pelaku teror. (Osy)-f

Mbah Parini, Pelestari Pohon Durian di Kaligono



KR-Jarot Sarwosambodo

Mbah Parini KISAH Inspiratif ini menceritakan tentang seorang perempuan lanjut usia, bernama Mbah Parini, warga Dusun Sawahan, Desa Kaligono, Kecamatan Kaligoning, Purworejo. Nenek berumur 87 tahun itu menjaga pohon durian raksasa warisan leluhurnya dengan setia. Saking setianya, Parini mengaku tidak akan menjual pohon yang tumbuh di Atas Sipentung Kaligono itu kepada siapa pun dengan harga berapa pun. "Kalau mau beli saja buahnya, biar pohon duriannya tetap lestari," ucapnya kepada KR, ditemui di Kaligono, Kamis (26/1).

Parini juga berencana mewariskan pohon durian itu kepada anak cucunya. Pesannya hanya satu, yakni merawat pohon berdiameter batang bawah dua meter dan tinggi 30-an meter itu sampai kapan pun, serta terus mewariskannya kepada generasi selanjutnya. "Pesan leluhur saya, jaga pohon durian itu sampai kapan pun," tegasnya.

Pohon durian lokal itu memang tergolong jenis super. Menurut Parini, durian yang dihasilkan memiliki rasa kombinasi manis pahit pedas dengan daging tebal, dan tidak pernah berubah setiap tahun. Pohon yang dikenal warga dengan sebutan Duren Ijo itu sudah menjadi sumber penghasilan tetap keluarga sepanjang tahun. "Sejak saya kecil sudah merasakan untung dari penjualan buah durian. Duren Ijo banyak yang mencari," ujarnya. Durian itu disebut Duren Ijo karena kulit berdurinya yang berwarna hijau. "Hijau kulitnya saja, tapi rasanya dijaman leggit manis dan agak pahit," ucapnya. Pohon durian itu mampu menghasilkan buah yang luar biasa, bisa 300-500 butir sekali musim panen. (Jarot S)-f

Polwan Didorong Jadi Influencer Kamtibmas

SEMARANG (KR) - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan profil polisi wanita (polwan) yang luwes, ramah dan keibuan menjadi nilai plus Polri di mata masyarakat. Untuk itu, dirinya melihat potensi polwan untuk menjadi influencer di media sosial guna mengedukasi masyarakat tentang kamtibmas. Kapolda mengungkapkannya hal itu, Rabu (25/1) saat memberikan arahan pada pertemuan rutin polwan di Mapolda Jateng Semarang.

"Penampilan polwan maupun gerak-gerik Polwan sebagai polisi maupun ibu rumah tangga sering menarik perhatian masyarakat. Demikian juga penyampaian imbauan kamtibmas

oleh Polwan seringkali lebih menarik warga dibanding bila himbauan disampaikan oleh polisi laki-laki (polki)," tuturnya.

Menurut pucuk pimpinan jajaran Polda Jateng hal itu, sudah terbukti di ranah media sosial Upload status atau informasi oleh polwan, lebih menarik publik dibanding yang disampaikan polki. Tidak heran, banyak polwan yang memiliki ribuan followers di media sosial

"Polwan Polda Jateng harus bisa menjadi duta untuk menyampaikan informasi-informasi kamtibmas di media sosial", tegasnya. Jenderal bintang dua itu juga menyebut polwan adalah figur atau putri pilihan. Tidak mudah menjadi Polwan dan ti-

dak semua anggota.

Achmad Luthfi menyebut dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri, ada sejumlah tugas yang lebih efektif dijalankan oleh polwan dibanding polisi pria. Tugas-tugas tersebut antara lain di bidang pelayanan terhadap perempuan dan anak di fungsi resepsi, trauma healing serta negosiasi unjuk rasa

Untuk itu polwan banyak memiliki nilai plus dibanding polki. Oleh karena itu, polwan disebut putri-putri pilihan. Perihal polwan yang telah berumah tangga diminta agar dapat menyeimbangkan peran sebagai seorang ibu rumah tangga maupun sebagai anggota polisi. Keberhasilan polwan

di pekerjaannya, berawal dari keberhasilannya menjalankan peran yang baik di lingkup rumah tangga.

"Salah satu nilai plus polwan adalah ketika dia pulang ke rumah dan berubah

peran menjadi ibu yang mengayomi anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Itu hal yang tidak mudah bagi seorang wanita, tapi itu adalah sesuatu yang luar biasa," ujar Achmad Luthfi. (Cry)-f



KR-Karyono

Para anggota polwan mengikuti arahan Kapolda Jateng.

Akurasi Data Potensial Jadi Soal Tahapan Mutarlih

PURWOREJO (KR) - Akurasi data pemilih menjadi potensi persoalan yang mungkin muncul dalam tahapan pemutakhiran data pemilih (mutarlih) dan penyusunan daftar pemilih Pemilu Serentak 2024.

Masyarakat yang bermasalah dengan administrasi kependudukan rentan kehilangan hak pilihnya apabila data mereka tidak terekam dengan benar saat proses pemutakhiran itu. Potensi masalah itu diungkap dalam rapat koordinasi Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kantor Bawaslu Purworejo. Bawaslu Purworejo mengidentifikasi berbagai potensi masalah dalam mutarlih di hadapan jajaran Polres Purworejo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hu-

mas Bawaslu Purworejo Anik Ratnawati mengatakan, kerawanan dalam tahapan mutarlih dan penyusunan daftar pemilih bahkan ada sejak proses pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Pelanggaran, katanya, dapat terjadi apabila proses tahapan itu tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku. "Tahapan pencocokan dan penelitian atau cokolit memiliki potensi kerawanan yang tinggi, dimulai dari pembentukan pantarlih," katanya kepada KR, usai pertemuan, Kamis (26/1).

Menurutnya, akurasi data pemilih juga menjadi faktor ker-

awanan selain proses pembentukan pantarlih. Anik mencontohkan adanya kelompok masyarakat dengan pemahaman administrasi kependudukan yang rendah, atau kelompok perantau, yang rawan tidak terjangkau proses cokolit.

Masyarakat yang menghadapi masalah administrasi kependudukan, katanya, juga kelompok pemilih yang rentan dilanggar haknya. "Misalnya terdapat data pemilih yang rawan tidak tercokolit seperti buruh, para perantau dan pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan lainnya," kata Anik.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Purworejo Rinto Hariyadi menambahkan, pelanggaran pidana pemilu juga berpotensi terjadi dalam tahapan mutarlih.

Selain itu, ada potensi pelanggaran administrasi dan kode etik penyelenggara pemilu dalam tahapan itu. Dijelaskan, potensi pelanggaran pidana pada tahapan mutarlih adalah hilangnya hak pilih masyarakat karena pelaksanaan proses yang tidak sesuai aturan.

Terpisah, Ketua Bawaslu Purworejo Nur Khoiqa mengemukakan, potensi kerawanan itu harus menjadi perhatian bersama agar tahapan mutarlih berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Selama ini memang belum pernah terjadi kasus pelanggaran pidana pemilu akibat pelaksanaan mutarlih yang tidak sesuai dengan prosedur di Purworejo. Meski demikian perlu upaya pencegahan untuk mengantisipasi potensi kerawanan tahapan mutarlih itu," tandasnya. (Jas)-f

Diretas, Sementara Situs PPIID Ditutup

MAGELANG (KR) - Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang, Noga Nanda Septa menjelaskan bahwa pihaknya telah mengetahui situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIID) telah diretas pada hari Selasa (24/1) sekitar pukul 14.00 WIB. Untuk mencari titik kelemahan pada sistem ppiid.magelangkab.go.id, Diskominfo Kabupaten Magelang telah menutup akses situs tersebut untuk sementara waktu.

Untuk diketahui, situs PPIID Kabupaten Magelang sempat diretas menjadi situs judi online oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Dengan kejadian seperti ini, ke depan kami perlu mempertimbangkan kembali audit sistem informasi, mungkin dalam skop yang lebih besar karena subdomain kami cukup banyak," terang Noga saat dikonfirmasi, Rabu (25/1). Terkait kejadian tersebut, pihak Diskominfo Kabupaten Magelang akan melakukan tindakan untuk melaporkan tindak peretasan kepada tim siber Polresta Magelang.

Mengutip UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, situs PPIID berisi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Informasi ini bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta-merta, dan wajib tersedia setiap saat.

Adapun Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. (Bag)-f

Asosiasi Kuat Partai dan Capres

MAGELANG (KR) - Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KedaiKOPI, terdapat asosiasi kuat antara partai dan capres. Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Anies Baswedan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo PhD, Kamis (26/1)

Hasil tersebut didapatkan dari distribusi elektabilitas partai-partai berdasarkan elektabilitas 4 calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Puan Maharani. Distribusi tertinggi pemilih Gerindra mendukung Prabowo sebesar 74,7 % diikuti Anies Baswedan 18,9 %, Ganjar 6,0 %, Puan 0,4 %. Jumlah pemilih Gerindra yang mendukung Prabowo menjadi yang paling besar jika dibandingkan distribusi pemilih partai-partai lain terhadap Prabowo.

Sementara itu, para pemilih PKS mayoritas mendukung Anies Baswedan sebagai Capres, yaitu sebesar 65,4 %. Jumlah ini menjadi yang terbesar jika dibandingkan distribusi pemilih partai-partai

lain terhadap Anies. Dukungan sisa pemilih PKS terhadap Ganjar sebesar 18,7 %, Prabowo 15,9 % dan Puan 0,0 %. PKS dan Anies tampak saling membutuhkan.

Pada bagian lain survei didapatkan hasil mayoritas pemilih Anies (sebanyak 18,4 %) adalah pemilih PKS.

Jika Anies tidak didukung PKS, maka potensi suara Anies akan hilang sebesar 18,4 %. Sebaliknya, PKS berpotensi kehilangan suara jika tidak mendukung Anies Baswedan. Pasalnya, terdapat 34,2 % para pemilih PKS menyatakan tidak akan memilih PKS jika PKS tidak meng-

gunakan Anies Baswedan.

Survei Opini Publik Menuju 2024 diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 22 November-2 Desember 2022 secara tatap muka dengan menggunakan teknologi CAPI (Computer-Assisted Personal Interview) kepada 1200 responden yang berusia di atas 17 tahun di 34 provinsi. Dicuplik dengan teknik multi-stage random sampling dengan tingkat kesalahan pencuplikan $\pm 2,83\%$ pada interval kepercayaan 95%. (Ati)-f



KR-Rini Suryati

Kunto Adi Wibowo PhD

Eskalasi Suhu Politik Semakin Memanas

SEMARANG (KR) - Tahun 2023 ditandai menguatnya suhu politik, yang eskalasinya terus memanas ketika memasuki 2024, saat dimulainya kontestasi Pemilu 2024 yang akan menjadi ajang pemilu serentak. Mulai Piliham Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu DPD RI, Pemilihan Gubernur (Pilgub) hingga Pilkada kabupaten/kota. Peran ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi penting dan sangat dibutuhkan untuk berperan sebagai dinamisator dan pengayom masyarakat.

Hal tersebut terangkum dalam diskusi Ngopi Bareng antara Wakil Ketua MPR sekaligus anggota DPR RI, Dr H Arsul Sani SH MSI dengan Pimpinan Pondok Pesantren Fadhlan Fadhlan (PPFF), Dr KH Fadlolan Musyafai Lc MA serta tokoh Jawa Tengah Drs H Istajib AS dan Muhammad Sahir, di

PPFF, Mijen, Kota Semarang, Selasa (24/1). Dalam Ngopi Bareng tersebut Kiai Fadlolan memberi nasihat, arah negara Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim ini, harus mencerminkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, baik dalam berpolitik, berbirokrasi, dan mengelola negara.

"Citra Islam yang rahmatan lil alamin ini harus tercermin di tengah hingar bingar Pemilu 2024, agar Pemilu 2024 berlangsung sukses serta menghasilkan para pemimpin yang amanah dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," harapnya. Mengamalkan syariat Islam, lanjut Kiai Fadlolan yang juga Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Tengah, sebagai kewajiban (amal al-syariah), dan boleh dilakukan dengan terang-terangan sebagai siar agama. Hal ini, tambahnya, berbeda dengan

Formalitas terapan syariah (tathbiq al-syariah) yang bila diterapkan tidak cocok untuk NKRI.

Dalam obrolan ngopi, Kiai Fadlolan juga menyinggung fenomena menguatnya opini larangan politik identitas. Ditegaskan, yang namanya politik praktis itu mesti tidak ada yang lepas dari identitas dan bahkan ideologi.

Seperti misalnya PDIP itu tidak bisa lepas dari identitas tokoh Soekarno. Sekira dilepas identitas tersebut maka PDIP akan tidak menarik lagi bagi rakyat. "Memang tercipta magnet tersendiri ketika PDIP mengusung pak Jokowi dalam dua periode menjadi Presiden RI," katanya.

Demikian pula Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu identik dengan Gus Dur, NU, bahkan ideologi agama Islam. Bila dilepas dari identitasnya maka PKB cenderung akan ditinggalkan konsti-

tuennya. Begitupula partai lain. Namun bila ada larangan politik identitas, itu tidak fair dalam beropini politik.

Menurut Kiai Fadlolan selama ini PPFF selalu menjadi tempat bertemunya para alim ulama, para pejabat negara, hingga masyarakat umum. Sebulan lalu, Menkopolhukam Prof Dr H Mahfud MD berkunjung dan menyampaikan ceramah, ke-

mudian Sabtu 28 Januari 2023 rencana akan dikunjungi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr H Saundia Uno. Tujuan berkunjung sowan, bersilaturahmi untuk memperoleh berkah.

Berkah kedatangan Arsul Sani untuk kali keempat di PPFF, disambut hangat oleh pimpinan PPFF dan Bu Nyai Hj Fenty Hidayah S Pdi. (Isi)-f



KR-Isdiyanto

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani (dua dari kiri) saat diterima pengasuh PPFF Dr H Fadlolan Musyafai' Lc MA (tiga dari kiri) bersama H Istajib AS (nomor satu dari kanan).